

**Konflik dan Kekerasan Sunni-Syiah Sampang Prespektif Kultur
Kekerasan dan Hak Asasi Manusia**

***Conflicts and Violence Of Sunni-Syiah Sampang Prespective Of Violence
Cultures and Human Rights***

Syukron Mahbub

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura

E-mail: sy.mahbub@yahoo.co.id

Abstrak

Persoalan konflik antar aliran dala Islam di Kabupaten Sampang telah menjadi isu nasional dan bahkan internasional yang hingga saat ini belum mencapai kata tuntas, hingga saat ini nasib para korban kekerasan masih mengungsi karena tidak diterima di tempat kelahirannya. Analisa yang berkembang saat ini hanya seputar mendiskreditkan korban kekerasan hanya dikarenakan bertentangan dengan paham mayoritas masyarakat sampang. Kajian ini mencoba menelusuri dan mengkaji persoalan konflik di Sampang dalam prespektif kultur budaya Madura serta perbandingannya dengan prinsip hak asasi manusia terkait dengan toleransi dan kebebasan beragama, dengan harapan akan mampu meluruskan anggapan-anggapan keliru seputar konflik Sunni dan Syi'ah di Kabupaten Sampang.

Kata Kunci: Konflik, Sampang, Kultur, dan HAM.

Abstract

The issue of conflicts between Islamic schools in Sampang Regency has become a national and even international issue which until now has not reached the word, until now the fate of the victims of violence still refugees because it is not accepted at birth place. The current analysis is only about discrediting victims of violence only because it is contrary to the majority of the people of Sampang. This study attempts to explore and examine the conflict in Sampang in the perspective of Madurese cultural culture and its comparison with human rights principles related to tolerance and freedom of religion, hoping to be able to correct misconceptions about Sunni and Shiite conflicts in Sampang District.

Keywords: Conflict, Sampang, Culture, and Human Right.

PENDAHULUAN

Mencermati kronologi peristiwa yang terjadi tanggal 26 Agustus 2012, baik dari versi Ulama' Bassra ataupun MUI Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa para ulama di Sampang menganggap kelompok Syiah sebagai pemicu terjadinya konflik. Dengan kata lain, berbagai kekerasan yang menimpa pengikut Syiah di Desa Karang Gayam dan Blu'uran dipicu oleh ulah mereka sendiri.

Namun, dalam berbagai pernyataan di media massa yang dikeluarkan pihak pemerintah, baik pemerintah daerah Sampang, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan Kementerian Agama, lebih spesifik menyebutkan bahwa konflik yang terjadi antara kelompok Sunni dan Syiah di Sampang bersumber dari perselisihan keluarga antara Tajul Muluk (Syiah) dan adiknya Rois al-Hukama'. Suryadharma Ali menyatakan:

"Akar masalah kerusuhan di Sampang itu adalah keluarga. Konflik itu dipicu oleh masalah keluarga. Jadi perlu dijelaskan lagi bahwa itu adalah masalah keluarga, bukan konflik aliran. Sekali lagi, bukan konflik antara aliran Syiah dan Sunni. Itu konflik antara Rois dengan Tajul Muluk, kakak beradik kandung. Kebetulan memang Tajul Muluk itu alirannya Syiah, Rois itu alirannya Suni. Tajul Muluk dan Rois itu sama-sama punya pengikut. Karena permasalahan ini berlarut-larut maka pengikutnya ikut campur, terjadilah konflik keluarga."

Selain Suryadharma, Said Aqil Siradj yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mendukung sikap pemerintah dengan menyatakan sumber konflik di Sampang adalah perselisihan keluarga yang memperebutkan pengaruhnya sebagai ulama' di Sampang. Said menambahkan bahwa kekerasan yang menimpa warga Syiah di Sampang murni kasus kriminal. Said tidak sependapat sependapat jika

penyerangan yang dilakukan terhadap warga Syiah mengatasnamakan warga NU.¹

Menganggap konflik yang terjadi di Sampang sebagai konflik keluarga adalah bentuk simplikasi persoalan. Namun kekompakan pemerintah yang seolah-olah menyederhanakan persoalan di Sampang dapat dianggap sebagai strategi agar persoalan tidak meluas. Sebab isu konflik Sunni-Syiah merupakan isu yang sensitif yang dapat memancing reaksi dari masing-masing pendukung kelompok tersebut. Meski demikian, sikap pemerintah tersebut menyebabkan persoalan sebenarnya menjadi tersamarkan. Bahkan secara tidak langsung sikap tersebut justru mendukung tuduhan bahwa Tajul Muluk dan pengikut ajarannya adalah biang permasalahan.

Menyalahkan Tajul Muluk dan pengikutnya sebagai sumber konflik berarti menyalahkan korban (*Blaming the Victim*). Konsep *blaming the victim* ialah pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan pada korban ketidakadilan². Dalam konsep *Blaming the Victim*, melalui kata-kata dan kalimat yang dilontarkan para tokoh agama dan aparat pemerintah, Tajul yang mengajarkan Syiah dan orang-orang yang mempercayainya lalu menjadi pengikutnya dipersalahkan sebagai pemicu terjadinya kekerasan yang menimpa mereka.

Fakta sebenarnya, Tajul Muluk dan pengikutnya adalah “korban” kekerasan oleh kelompok mayoritas (Sunni) yang merasa berada di posisi yang benar. Dalam hal ini Tajul Muluk adalah korban yang paling dirugikan. Ia tidak hanya dituduh sebagai sumber utama konflik di Sampang, namun menjadi sasaran utama kekerasan. Rumah tempat tinggalnya dihancurkan, kompleks pesantren miliknya dibakar, ia sebelumnya direlokasi ke Malang, dan saat ini ia meringkuk di penjara setelah divonis Pengadilan Tinggi Jawa

¹Dikutip dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/28/063426047/NU-Anggap-Konflik-Sampang-Masalah-Keluarga> (22 September 2012)

² Baca William Ryan, *Blaming The Victim* (New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 1976), hlm.xii.

Timur melakukan penistaan agama dengan tuntutan hukuman 4 tahun penjara. Padahal pada tahun 2011, saat pertama kali diajukan ke Pengadilan Negeri Sampang, hakim hanya memvonis Tajul hukuman 2 tahun penjara. Namun setelah dilakukan banding ke pengadilan tinggi, vonis Tajul malah bertambah menjadi 4 tahun sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum.³

Berbagai kronologi yang disampaikan oleh beragam pihak dan lembaga memang menyajikan beragam versi. Untuk itu, kajian ini tidak lagi menelusuri seputar kronologi, tetapi lebih pada usaha menghubungkan konflik tersebut dengan kultur kekerasan yang selama ini identik dengan tradisi Madura. Kultur kekerasan tersebut nantinya akan dihubungkan dengan pandangan HAM dalam menyikapi persoalan konflik yang terjadi di Sampang ini.

PEMBAHASAN

1. Kasus Sunni-Syiah Sampang Prespektif Kultur Kekerasan Masyarakat Madura

Konflik Sunni dan Syiah di Sampang sebenarnya juga tidak bisa lepas dari akar budaya masyarakat yang masih lekat dengan tradisi kekerasan. Kekerasan yang dimaksud dalam hal ini adalah tradisi carok. Intensitas carok di Kabupaten Sampang relatif lebih tinggi di banding 3 (*tiga*) kabupaten lainnya di Madura. Kultur kekerasan juga tampak dari kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam (umumnya adalah *Clurit*) dalam aktivitas sehari-hari.⁴ Kebiasaan membawa senjata tajam ini disebut *nyikep*.⁵ Hal serupa juga ditemui di Desa Karang Gayam dan Blu'uran. Tradisi semacam ini bukan untuk gagah-gagahan, namun memang untuk menjaga diri. Bagi sebagian masyarakat Sampang, orang yang keluar rumah

³ Diakses dari www.KBR68H.com (23 September 2012).

⁴ Data Bakesbangpol Sampang,

⁵ Dalam bahasa Madura, *nyikep* berarti membawa senjata tajam (celurit) yang disembunyikan di dalam pakaian.

tanpa membawa *clurit* bisa dikatakan orang sombong karena ia berani keluar dengan tangan kosong (tanpa senjata).

Tradisi membawa senjata tajam tampaknya juga berhubungan dengan masih tingginya angka kriminalitas di Sampang. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, pada tahun 2010 jumlah narapidana yang mendekam di Rutan Sampang adalah 64 (*enam puluh empat*) orang, sedangkan jumlah tahanan sebanyak 126 (*seratus dua puluh enam*) orang. Jumlah tahanan ini yang terbesar di wilayah Madura. Kondisi tersebut lebih banyak dibanding kasus kekerasan carok yang terjadi di Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.⁶

Dalam kondisi ancaman hidup bisa yang datang sewaktu-waktu seiring kentalnya tradisi kekerasan, maka bagi masyarakat mempersenjatai diri adalah keharusan.⁷ Namun, tentunya suasana psikologis orang yang membawa senjata tajam dengan yang tidak, berbeda. Jika tidak diimbangi dengan pengendalian diri yang kuat, orang dengan senjata tajam lebih mudah terpancing untuk melakukan tindak kekerasan.⁸ Terlebih lagi jika berhadap-hadapan antara dua pihak yang sama-sama memegang senjata tajam. Karena itulah *carok* tidak selamanya terjadi karena persoalan besar. Hal-hal kecil dan sepele (misalnya, *senggolan* di jalan, kata-kata yang membuat tersinggung orang lain, beda pendapat) pun dapat berujung pada *carok*.

Apabila hal kecil di atas dapat saja memicu terjadinya konflik kekerasan, apalagi isu ajaran agama yang sangat sensitif bagi orang Madura tentu dengan lebih mudah untuk tersulut. Itulah yang terjadi di Desa Karang Gayam dan Blu'uran. Iklil Milal, kakak Tajul Muluk yang juga pemimpin

⁶BPS Jatim, Kasus Kekerasan di Madura, www.bps.jatim.go.id/kasuss-kekerasan-di-madura.html, diakses 15 januari 2017.

⁷Taufiqurrahman, "Islam dan Budaya Madura", Makalah disampaikan pada acara *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI, Bandung, 26-30 November 2006, hlm. 7.

⁸ A. Latief Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 26.

Syiah di Desa Blu'uran, pernah memberikan penjelasan mengenai kasus penyerangan terhadap warga Syiah 4 April 2011 lalu. Menurutny, andai kata pengikut Syiah di Desa Karang Gayam dan Blu'uran pada waktu itu tidak mampu mengendalikan diri dan membalas serangan kelompok anti-Syiah, hampir dipastikan akan terjadi carok massal dan konflik di Sampang itu sebenarnya dapat dibaca dan dianggap juga sebagai bentuk carok massal.⁹

Sulitnya meredakan konflik di Sampang karena faktor budaya kekerasan (*carok*) yang masih melekat dalam tradisi masyarakat. Iklim yang panas dan wilayah geografis Sampang yang kekeringan membuat warga di sana mudah tersulut emosi. Ditambah dengan tradisi carok maka lengkaplah sumbu potensi konflik di Sampang yang bisa terbakar kapan saja.¹⁰ Carok sering menjadi solusi terakhir dari perselisihan antarwarga Sampang. Terkadang pertempuran ini akan melibatkan seluruh keluarga, bahkan seluruh warga kampung. Pada tradisi masyarakat Sampang ada kalimat yang menggambarkan tradisi carok, "*lokana daging bisa ejai', lokana ate tada' tambana kajaba ngero' dara*". Kalimat itu berarti "daging yang terluka masih bisa dijahit, tapi jika hati yang terluka tidak ada obatnya, kecuali minum darah."¹¹

2. Kasus Sunni-Syi'ah Sampang Prespektif

Kabupaten Sampang mengklaim sebagai daerah mayoritas penduduknya adalah Muslim dan 99% berpaham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang dimaksud di sini adalah Nahdlatul Ulama. Keberadaan komunitas Syiah pimpinan Tajul Muluk, dianggap sebagai penyakit yang menggerogoti kebesaran NU di Sampang.

⁹ Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman ; Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam*. (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 65.

¹⁰ Andang. Subaharianto, *Tantangan Industrialisasi Madura ; Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*. (Malang: : Bayumedia, 2004), hlm. 72.

¹¹ Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 29.

Ini terlihat jelas dalam pernyataan Rais Syuriah PCNU Sampang, yang menyatakan bahwa pengusiran Tajul Muluk perlu dilakukan agar tidak terlalu luas menyebarkan pengaruhnya, sebab Syiah merupakan ancaman yang meresahkan bagi eksistensi NU dengan kebesarannya.¹²

Sebelum kedatangan Tajul muluk dengan membawa aliran Syiah masyarakat yang tinggal di desa Karang Gayam dan sekitarnya merasa aman, tenteram, dan kondusif. Namun setelah itu keadaan berubah, Tajul menjadi pemicu terjadinya konflik di masyarakat Karang Gayam dan sekitar dengan ajaran Syiah yang disampaikannya.

Keberadaan Tajul Muluk dianggap sebagai pemicu terjadinya konflik oleh karenanya melimitasi (membatasi) gerakan Tajul Muluk dengan mengamankannya yang dilakukan oleh negara dianggap dapat dibenarkan dan bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini negara telah menjalankan tugasnya, negara melakukan limitasi (pembatasan) dengan melakukan pencegahan terhadap terjadinya konflik yang berkepanjangan dikemudian hari. Pasal 18 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban umum, kesehatan atau hak asasi dan kebebasan mendasar orang lain.

Tajul Muluk sebagai warga negara memang memiliki hak untuk menjalankan dan menentukan kepercayaannya pada suatu agama atau aliran keagamaan tertentu, tetapi ekspresi dan prilakunya yang meresahkan masyarakat dapat menyebabkant emosi warga, dan dapat melahirkan konflik yang mengarah pada korban fisik. Karenanya pembatasan terhadap hak tersebut dapat dibenarkan demi menjaga stabilitas dan keamanan di

¹² Andang Subaharianto, *Op.Cit*, hlm. 78.

Sampang yang memang dikenal sebagai daerah yang rawan terjadi tindakan kekerasan.

Perlu dipahami bahwa cakupan pembatasan dalam hukum HAM harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: 1) Dibenarkan oleh hukum (*by law*); 2) Mempunyai kekuatan hukum; 3) Memenuhi unsur tujuan yang sah (*legitimate aim*), Pada kondisi ini tujuan yang sah dalam kasus Tajul Muluk ialah demi menjaga ketertiban umum bebas dari kehancuran yang melanda masyarakat, menjaga dan melindungi keamanan dari terjadinya konflik dan carok massal, melindungi masyarakat dari kehancuran; 4) Proporsionalitas *necessary in democratis society*, yakni menjaga keutuhan demokrasi dari bahaya yang mengancam demi keselamatan bangsa dari terjadinya konflik berkepanjangan.¹³

Masyarakat yang secara ketat disatukan oleh nilai-nilai bersama seperti masyarakat NU Sampang cenderung tidak bisa menerima kelompok lain yang berbeda yang hidup di tengah-tengahnya. Pengusiran terhadap komunitas Syiah adalah cara dan upaya agar tetap mempertahankan kesatuan masyarakat. Tuduhan sesat yang dilontarkan kepada Syiah hanyalah cara yang digunakan untuk mengabsahkan upaya itu. Konflik sosial yang ditandai oleh sentimen keagamaan akan melahirkan jargon-jargon keagamaan yang digunakan untuk mendelegitimasi lawan agar hukuman terhadap lawan *legitimate* secara agama.

Tokoh-tokoh NU bukan tidak menyadari makna toleransi, mereka menyadari pentingnya menghargai perbedaan, bahkan menghargai perbedaan diakui sudah ada dalam tubuh NU.¹⁴ Tetapi, seluruh pengetahuan akan toleransi ini menguap ketika dihadapkan pada kenyataan akan keberadaan Syiah sebagai kelompok berbeda yang eksis dan berkembang di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan bahwa persoalan

¹³ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 89.

¹⁴ Wawancara dengan Bukhori Maksum, Rois Syuriah PCNU Sampang, 16 Oktober 2011.

pluralisme dan toleransi bukan persoalan definisi yang dihafalkan, namun persoalan sikap terhadap kelompok lain yang berbeda.

PENUTUP

Persoalan berkaitan dengan konflik Sunni-syi'ah di Kabupaten Sampang hingga saat masih memposisikan pelaku kekerasan sebagai pihak yang paling bersalah dalam terjadinya kekerasan berbasis agama, padahal latar belakang terjadinya konflik berupa perebutan calon istri dan sebagainya yang memang melahirkan konflik dalam budaya Madura jarang tersentuh oleh media. Terjadinya konflik antar aliran agama di kabupaten sampang tidak sepenuhnya disebabkan oleh agama, sebab banyak faktor lain di luar paham agama yang juga memicu terjadinya konflik tersebut. Belum lagi dasar pemikiran yang menempatkan HAM pada posisi yang mutlak dan nyaris tanpa batas membuat suasana dan usaha rekonsiliasi pasca konflik sulit dilaksanakan. Kedepan diharapkan agar penyelesaian konflik ini lebih mengedapankan unsur budaya masyarakat Madura serta berupaya menyeimbangkan posisi hak dan kewajiban asasi manusia dalam upaya penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Latief Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Andang. Subahianto, *Tantangan Industrialisasi Madura ; Membentuk Kultur, Menjunjung Leluhur*. Malang : Bayumedia, 2004.
- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- BPS Jatim, Kasus Kekerasan di Madura, www.bps.jatim.go.id/kasuss-kekerasan-di-madura.html, diakses 15 januari 2017.

Tempo, NU Anggap Konflik Sampang Masalah Keluarga, <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/28/063426047/NU-Anggap-Konflik-Sampang-Masalah-Keluarga.html>, diakses 18 Januari 2018.

Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman ; Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam*. Jakarta : Gramedia, 1989.

Taufiqurrahman, "Islam dan Budaya Madura", Makalah disampaikan pada acara *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI, Bandung, 26-30 November 2006.

William Ryan, *Blaming The Victim*, New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 1976.